

Peranan Mayor Jenderal Tni (Purn) Raden Mohammad Mangoendiprodo dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya Tahun 1945- 1949

Rehardini Dwi Ardianti

SMKS Satria Nusantara Betung
ardianti.dwi@gmail.com

Abstrak

Setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka Belanda masih ingin kembali menguasai wilayah Indonesia, Belanda dengan mengandalkan kekuatan militer mengancam kemerdekaan Indonesia. Perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan mulai bermunculan dari berbagai penjuru tanah air, salah satunya di kota Surabaya, di Surabaya perlawanan mempertahankan kemerdekaan dipimpin oleh salah satu tokoh militer yaitu Mayor Jenderal Raden Mohamad Mangoendiprodo, dengan perannya berhasil mempertahankan kemerdekaan di Indonesia di Surabaya. Alasan inilah menjadikan peneliti untuk mengkaji sejauh mana peran Mayor Jenderal Raden Mohamad Mangoendiprodo mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode penelitian sejarah dengan Langkah langkahnya yaitu: Heuristik, merupakan Langkah mencari sumber sejarah baik primer maupun sekunder, selanjutnya Verifikasi merupakan upaya mengkritisi data yang diperoleh, kemudian interpretasi yang menafsirkan data yang diperoleh agar tersusun dengan baik. Langkah akhirnya yaitu historiografi menyusun data yang menjadi sebuah narasi yang dapat diterima. Dengan penggunaan metode historis dapat disimpulkan penelitian yaitu awal mula dilakukannya upaya mempertahankan kemerdekaan oleh Raden Mohamad di Surabaya.

Kata kunci: *Mempertahankan, Raden Mohamad Mangoendiprodo, dan Indonesia*

Abstract

After Indonesia succeeded in proclaiming Indonesian independence on August 17, 1945, Indonesia was still not fully independent. The Netherlands still wants to regain control of Indonesian territory; by relying on military force, the Netherlands threatens Indonesian independence. Resistance to defend independence began to emerge from various parts of the country, one of which was in the city of Surabaya, Surabaya the resistance to defending independence was led by one of the military figures, namely Major General Raden Mohamad Mangoendiprodo, with his role in successfully defending Indonesia's independence in Surabaya. This reason makes the researcher examine the extent of the role of Major General Raden Mohamad Mangoendiprodo in defending the independence of Indonesia. To find out the answers to these problems, historical research methods are used with the steps, namely: Heuristics, which are steps to find historical sources, both primary and secondary, then Verification is an effort to criticize the data obtained, then interpretations that interpret the data obtained so that they are well structured. The final step is historiography compiling the data into an acceptable narrative. Using the historical method, it can be concluded that the research was the beginning of the efforts to maintain independence by Raden Mohamad in Surabaya.

Keywords: *Maintaining, Raden Mohamad Mangoendiprodo, and Indonesia*

Pendahuluan

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah tiga hari yaitu pada tanggal 17

Agustus 1945, penyerahan tanpa syarat yang dilakukan Jepang kepada Sekutu dan untuk “memanfaatkan kekosongan kekuasaan (*Vakum of Power*), pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya jam 10.00 pagi di kediaman Ir Soekarno di Jalan Pengangsaan

Timur No. 56, Jakarta atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia” (Santoso, 2006: 26).

Walaupun secara hukum *De Jure* pemerintahan militer Jepang tidak berkuasa lagi di Indonesia setelah proklamasi dilaksanakan, namun pada kenyataannya atau secara *De Facto* pemerintahan militer Jepang masih menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya sebuah instruksi dari Sekutu bahwa” Sekutu masih memegang kekuasaan sampai pihak Sekutu datang dan Jepang diberikan amanat dilarang untuk menyerahkan senjata kepada siapapun kecuali kepada Sekutu” (Sukardi, 1991: 64).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya intruksi dari Sekutu yang membuat larangan bagi Jepang untuk tidak menyerahkan senjata kepada pihak manapun walaupun secara *De Facto* Jepang tidak berhak lagi untuk berkuasa di Indonesia, karena Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya.

Lain halnya dengan pihak Belanda yang baru mengetahui bahwa rakyat Indonesia yang telah berhasil memproklamkan kemerdekaan, pada saat itu Belanda sangat sulit untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, karena keinginan Belanda yang masih kuat untuk menanamkan pengaruh Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia. Dalam perjanjian Kalijati yang dipimpin oleh Tjanda van Starkeborgh yang merupakan Gubernur Hindia Belanda pada saat itu, dalam perjanjian tersebut “pemerintahan Belanda mengklaim kepada dunia Internasional bahwa Hindia Belanda tidak pernah menyerahkan Indonesia kepada Jepang dan tidak mengakui

kemerdekaan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia itu sendiri” (Poeponegoro dan Notosusanto, 2008 : 9).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Belanda juga tidak menganggap sepenuhnya kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia karena mereka juga berpedoman pada Perjanjian di Kalijati yang pada saat itu pihak Belanda beranggapan bawah “Belanda tidak pernah menyerahkan Indonesia kepada Jepang dan kemerdekaan Indonesia atas Jepang tidak dianggap sah oleh Belanda dan Belanda masih ingin menguasai Indonesia” (Suhartono, 1994: 199).

Pada tanggal 19 September 1945, tantara Sekutu di bawah komandan Laksamana Lord Lois Mountbatten – komandan Asia Tenggara (*South East Command*) telah terlebih dulu datang ke Indonesia tugas mereka adalah menduduki wilayah-wilayah Indonesia dan melucuti tentara Jepang, dilanjutkan pada tanggal 29 September 1945 di bawah kendali Jenderal Christison, yang memimpin pasukan *Allied Force Netherlands East Indie (AFNEI)* tiba di Jakarta. Dalam menjalankan misinya di Indonesia AFNEI hanya berkonsentrasi tugas di Jawa dan Sumatera. Itupun, dibagi menjadi tiga divisi sebagaimana dijelaskan oleh Garda Maeswara dalam bukunya *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950, Pertama*; 23rd Indian Division atau divisi India 23, di bawah pimpinan komando Mayor Jenderal D.C Hawtron divisi ini bertugas di Jawa Barat dan berpusat di Jakarta, kemudian 5rd Indian Division atau divisi India 5, di bawah komando Jenderal E.C. Mansergh divisi ini bertugas di Jawa bagian Timur dan berpusat di Surabaya dan terakhir 26

rd Indian Division atau divisi 26 di bawah komando Jenderal H.M Chambers divisi ini bertugas di Sumatera dan berpusat di kota Medan (Maeswara, 2010: 35).

Mula-mula rakyat Indonesia, seperti ketika Jepang datang ke Indonesia menyambut dengan gembira kedatangan tentara Sekutu, namun ketika diketahui bahwa tentara Sekutu membawa serta Neterland Indies Civil Administration (NICA) kekuasaan Kolonial Hindia Belanda, rakyat Indonesia mengambil sikap bermusuhan. Situasi semakin memburuk kala NICA mempersenjatai serdadu-serdadu bekas Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) yang merupakan “angkatan perang yang dibentuk oleh Angkatan Perang Hindia Belanda yang memiliki 3 divisi yaitu darat, laut dan udara anggotanya berasal dari pribumi Hindia Belanda dan orang-orang Afrika, sehingga terjadilah bentrokan senjata di beberapa wilayah seperti, Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung” (Maeswara, 2010: 36).

Pada tanggal 30 September 1945 terjadi pengepungan Gudang Senjata Don Basco milik pemerintahan Jepang di Surabaya, peristiwa itu melibatkan para pemuda para pelajar dan anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) semua berkumpul untuk menyerbu Gedung Senjata Don Basco pada tengah malam tanggal 30 September 1945 “R.Mohamad dan Sutomo atau Bung Tomo melakukan negoisasi dengan pemerintahan Jepang agar

mau menyerahkan senjata kepada para pemuda Surabaya, dan keduanya berhasil meredam amarah para pemuda, pelajar dan anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sudah menunggu, setelah negoisasi berjalan dengan alot akhirnya senjata berhasil diserahkan kepada pemerintah Surabaya” (Moehkardi, 1993 : 72).

Setelahnya pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintahan Indonesia bergerak cepat untuk menciptakan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang telah dibentuk sebelumnya pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) , kemudian dihapuskan dan diganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ini otomatis merubah struktur pembentukan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keamanan Rakyat sama halnya dengan kota lain di Surabaya pada tanggal 5 Oktober 1945 sesuai dengan dekrit yang telah dikeluarkan oleh presiden Republik Indonesia, sesuai dengan anjuran itu drg.Moestopo selaku ketua Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur, memerintahkan kepada “Moestopo untuk menyusun beberapa anggota Stafnya antara lain sebagai berikut: Kepala Staf diketuai oleh :Soejatmo, Urusan Angkatan Darat diketuai oleh :R. Mohamad, Urusan Angakatan Laut diketuai oleh Admadji, urusan Perang Griliya diketuai oleh : Katamhadji, dan bagian Keuangan dipimpin oleh :Soerajo” (Maeswara, 2010: 37).

Setelah adanya beberapa serangan di kota Surabaya dan kota-kota lain di penjuru Nusantara, upaya mempertahankan kemerdekaan di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai cara seperti Perjanjian Linggar Jati yang

telah disepakati pada tanggal 25 Maret 1947 hanya berlangsung selama 4 bulan Pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan aksi Agresi Militer yang pertama ke seluruh wilayah Republik Indonesia, Agresi Militer Belanda I belum merupakan “serangan penghancuran total terhadap pemerintahan Republik Indonesia masih terbatas pada penugasan daerah sebagai sumber devisa seperti Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menguasai sumber perkebunan, selanjutnya di daerah Sumatera dipergunakan untuk menguasai sumber minyaknya” (SESKOAD, 1990: 61).

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil kajian literatur (*library research*), bersifat deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh melalui bacaan literatur dianalisa dan dikompromikan secara kritis untuk selanjutnya dideskripsikan secara naratif. Sebagai penelitian kualitatif, pengolahan data penelitian dilakukan secara prosedural agar teori substantif dapat tersusun (Moleong 2007, hlm. 10).

Penelitian ini hanya melanjutkan dan melengkapi data yang sudah ada, sebagai nilai tambahnya adalah memberikan informasi yang berbasis riset. Langkah-langkah dalam pengolahan dan analisa data menggunakan pendekatan historis, yaitu suatu proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap peninggalan-peninggalan masa lampau (Gottschalk 1975, hlm.32) Pertama, mengklasifikasikan data-data sejarah mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan peranan Raden Mohamad Mangoendiprodjo serta hal

hal yang berkaitan agar diketahui mana data orisinil dan yang bukan. Kedua, melakukan analisis, yaitu studi terhadap data yang diperoleh dalam bentuk analisa historis. Ketiga, mengkaji hubungan yang berupa peran Raden Mohamad Mangoendiprodjo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Keempat, data yang telah dipetakan, disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan sehingga hasil kajian dapat ditemukan. Langkah terakhir dalam metode ini adalah historiografi. Dalam hal ini, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian dengan gaya bahasa menarik dan komunikatif, dengan menggunakan teknik dasar menulis deskriptif, naratif dan analisis. Selanjutnya untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua batasan pertama batasan Spatial yaitu batasan tempat lokasi penelitian berada di daerah Jawa Timur. Kemudian batasan temporal yaitu batasan waktu, penelitian ini mengkaji batasan waktu tahun 1945-1949.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Mayor Jenderal TNI (PURN) Raden Mohamad Mangoendiprodjo Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya tahun 1945-1949

Meletusnya Perang Asia Pasifik diawali dengan serangan Jepang ke Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawaii) pada tanggal 7 Desember 1941, keesokan harinya yakni tanggal 8 Desember 1941 Amerika Serikat, Inggris, Belanda mengumumkan perang kepada Jepang, sehingga berkobarlah Perang Asia Pasifik. Pada awal abad ke

XX pemerintah Kolonial Belanda mulai kehilangan cara dalam mengendalikan pergerakan nasional Indonesia. Beragam organisasi pergerakan dengan berbagai corak dan latar belakang tumbuh subur di berbagai daerah. Seiring dengan itu Jepang semakin leluasa memperluas wilayah kekuasaannya dalam Perang Asia Timur Raya, semangat Jepang didasari oleh semangat *Hakko Ichiu* dengan merambah Asia Tenggara hingga masuk ke Indonesia “pada tanggal 8 Maret 1942, Ter Porteen (Panglima Tentara Hindia Belanda) harus menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang di Kalijati, maka mulailah periode pendudukan Jepang di Indonesia (Ernawati, 2009: 56).

Pada tahun 1943, atas usul dari Gatot Mangkupraja yang merupakan seorang tokoh pergerakan kebangsaan mengajukan surat permohonan kepada *Gunseiken dan Seikosikikan* agar pemerintahan membentuk barisan sukarela untuk membela tanah air. Permohonan tersebut mendapat “sambutan baik dari pemimpin tentara Jepang sehingga keluarlah *Osamu Seirei* no.44 pada 3 Oktober 1943 mengenai pembentukan tentara sukarela untuk membela Jawa, yang kemudian disebut dengan Pembela Tanah Air (PETA) yang beranggotakan orang-orang Indonesia” (Suryanegara, 1996: 168).

Tentara Peta diberi corak *kebangsaan* dari prajurit sampai perwira tertinggi *daidanco* (komandan batalyon) seluruhnya orang pribumi mempunyai panji-panji sendiri, pakaian seragam dan tanda pangkat sendiri yang berbeda dengan Tentara Jepang, serta unsur Islam yang ditonjolkan sesuai dengan namanya tugas pokok Peta adalah “mempertahankan tanah air. Loyalitas

Peta dikontrol dengan menempatkan *daidan* (batalyon) Peta terpisah satu sama lain dan masing masing berada di bawah komando pasukan Jepang setempat dan setiap *daidan* ditempatkan tim pelatih yang sekaligus bertindak sebagai pengawas” (Notosusanto, 1979: 57).

R Mohamad yang pada saat itu menjabat sebagai *Soncho* atau yang dikenal dengan camat pada saat itu mengalami kesulitan sandang papan dan pangan setelah terkikisnya adat dan istiadat Jawa Feodal dimana golongan Pangreh Praja atau priyayi pada saat itu mengalami “kemunduran setelah pendudukan Jepang di Indonesia dan mengenai status sosial di masyarakat Jawa Feodal. Pada saat itu tawaran menjadi anggota Peta semakin gencar di kalangan masyarakat” (Kartodirjo, 1987: 24).

Organisasi Peta disusun berdasarkan wilayah dengan dua hingga lima *battalion* (*daidan*) disetiap keresidenan tiap *daidan* berada berada langsung di bawah komando tentara Jepang setempat. R Mohamad memulai Pendidikan militer pada bulan Agustus dan selesai pada akhir Oktober 1944, R Mohamad yang masuk pada Angkatan III yang terdiri dari 11 *Daidanco*, 44 *Chaudancho* dan 460 *Shudancho* dan mereka ditempatkan di II *daidan* (Batalyon), sedangkan R Mohamad menjadi ditempatkan di Surabaya, bersama 4 *daidan* Peta lainnya diantaranya yaitu: yang berkedudukan di kota Surabaya dipimpin *daidanco* Sutopo, dan II *Daidan* di Mojekerto dipimpin oleh *Daidanco* Katamhadi, *Daisan* III *Daidan* di Sidoarjo dipimpin oleh *Daidanco* R Mohamad dan *Daiyon* IV yaitu *Daidan* Gresik dipimpin oleh *Daidancho* Cholil. Tentara Peta di

persiapkan dengan tujuan pasukan Pembela Tanah Air diarahkan sebagai kekuatan pertahanan wilayah-wilayah dan pasukan Peta dipersiapkan untuk mempertahankan daerah-daerah keresidenan setempat seperti Jawa dan Bali (Kompas Pedia, 2021: diakses pada Jumat, 27 Agustus 2021

Pada tanggal 18 Agustus 1945 di asrama Peta di Sidoarjo para tentara Peta mendapat intruksi dari para *shihodokan* agar senjata mereka dikumpulkan di Gudang dengan alasan akan ada pemeriksaan, karena hal demikian di anggap wajar dan rutin dilakukan dan membuat anggota peta tidak curiga, sementara senjata dikumpulkan dan diangkat menggunakan truk keluar *Daidan* para prajurit dan perwira Peta diapelkan di tempat terpisah, sehingga perlucutan senjata Peta tersebut tidak diketahui oleh para anggota, kecurigaan anggota Peta baru terjawab ketika esok harinya seluruh anggota dikumpulkan untuk mendengarkan pidato Seinin Shidokan, Seinin Shidokan tersebut berkata bahwa Angkatan Perang Tentara Jepang telah menghentikan perlawanan terhadap tentara Sekutu, dan atas kerangka di atas Jenderal Nagano menjelaskan bahwa Peta resmi dibubarkan dan dikembalikan tempatnya masing-masing dan memperoleh 6 bulan gaji, pembubaran tentara Peta ini disambut gembira oleh prajurit, dan R Mohamad menerima berita tersebut dengan perasaan bercampur aduk antara gembira dan juga tanda tanya, sebelum para perwira peta bubar, R Mohamad berkumpul bersama perwira yang lain agar masih terus senantiasa memelihara semangat cinta tanah air (Moehkardi, 1993: 54)

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus

1945 PETA resmi dibubarkan dan digantikan oleh Badan Keamanan Rakyat dan setelah itu R Mohamad juga bergabung menjadi bagian dari Badan Keamanan Rakyat yang murni bentukan Indonesia, karena alasan itulah R Mohamad bergabung menjadi Tentara karena kecintaannya terhadap tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kondisi Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Sosial Masyarakat Surabaya Pada Saat Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949

Pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut masa Revolusi Fisik, merupakan suatu kondisi yang cukup berat bagi bangsa Indonesia karena disamping harus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihinya tetapi harus berjuang untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, pada saat mempertahankan kemerdekaan kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya khususnya masyarakat Surabaya mengalami perubahan.

1. Kondisi Politik Kota Surabaya Pada Tahun 1945-1949.

Kurun waktu 1945-1949 merupakan suatu masa perjuangan fisik dan militer, disamping usaha-usaha politik yang dilakukan pemerintahan Indonesia untuk memperoleh pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia baik dari pihak Belanda maupun dunia internasional.

Pada awal periode kemerdekaan setelah proklamasi terdengar di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 1945 dimana berita ini disambut antusias oleh masyarakat Surabaya,

setelah pemerintahan pusat Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan agar membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah-daerah dan terbentuklah Komite Nasional Indonesia Surabaya pada tanggal 27 Agustus 1945 dan terbentuklah pengurus Komite Nasional Indonesia keresidenan Surabaya, ketua Komite Nasional Indonesia dijabat oleh Doel Arwono, Wakil ketua oleh Bambang Seoprpto, Mr Dwidjosewojo dan pada tanggal 3 September 1945 terjadi "pengesahan Pemerintahan Republik Indonesia daerah Surabaya oleh R Soedirman atas desakan Angkatan pemuda dimana pada saat itu R Soedirman menjabat sebagai Wakil Residen Surabaya, hal ini menjadi pertanda adanya pemerintahan baru di Surabaya" (Moehkardi, 2020: 29) Pada sore hari tanggal 3 September 1945 di rumah Ketua Komite Nasional Indonesia Dul Arnowo. Setelah mendengar kabar Residen Sudirman telah datang dari Jakarta, Dul Arnowo mengutus beberapa orang bekas perwira Peta pergi ke rumah Residen Sudirman untuk membawa surat yang harus ditandatangani oleh Residen Sudirman. Mereka berangkat beramai-ramai antara lain Isa Edris, Kholil Tohir, Usman Aji, Yahya Hasyim, Abdul Wahab. Surat diserahkan kepada Residen Sudirman. Tanpa dibaca lebih lanjut surat itu ditandatangani. Surat dikembalikan kepada para pengantar untuk disampaikan kepada Dul Arnowo. Surat itu sebenarnya adalah Proklamasi Pemerintah Republik Indonesia Surabaya. Pada sore hari itu juga surat itu dicetak kemudian malam harinya disebarkan ke Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Lamongan.

Menurut (Gunawan dan Asnan. 2015: 278), isi Proklamasi Daerah Surabaya tanggal 3 September itu sebagai berikut:

1. Terhadap segala perbuatan yang menentang Pemerintah Republik Indonesia diambil tindakan keras
2. Di seluruh daerah Surabaya bendera kebangsaan Indonesia, sang Merah Putih harap dikibarkan
3. Keamanan dan ketentraman umum dipegang dengan keras dan menurut peraturan yang berlaku hingga sekarang.
4. Terhadap pelanggar paraturan tersebut oleh yang berwajib diambil tindakan tegas.
5. Segala pekerjaan, usaha dan urusan pemerintah tetap berjalan sebagai sediakala sebelum ada penetapan lebih lanjut
6. Kepada seluruh penduduk diperintahkan untuk melakukan kewajiban sehari-hari dengan tenang seksama dan mengikuti disiplin.
7. Kepada semua badan-badan usaha dan perkumpulan-perkumpulan diperintahkan untuk bekerja terus di dalam suasana kekeluargaan saling membantu untuk keselamatan, masyarakat, dan penduduk umumnya.

Setelah itu masyarakat Surabayamenghadapi timbul masalah

baru, yaitu usaha kembalinya Belanda memerintah Surabaya setelah kekalahan Jepang. Orang Belanda bekas *interniran* yang berkeliaran mulai beraksi. Mereka berusaha mengkonsolidasikan diri dengan membentuk Komite Kontak Sosial pada tanggal 27 Agustus 1945. Jadi bersamaan dengan terbentuknya Komite Nasional Indonesia daerah Surabaya. Tokoh- tokohnya berasal dari bekas *Indo Europees Verbond* (IEV) seperti A.W. Bastiaans, Mr. W.V.C. Ploegman, J. Hoeksema, dan C.A. Coenink. Dengan dalih dan berlindung di bawah nama *Intercross Palang Merah Internasional* dengan tugas kemanusiaannya, “mereka melakukan aksi- aksi politik dan mata-mata dengan mendapatkan fasilitas yang terbaik pada waktu itu, yakni Hotel Yamato (Oranje Hotel). Mereka diam-diam mendapat bantuan dari Jepang, mereka dengan leluasa melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Belanda” (Gunawan dan Asnan. 2015 : 285)

Setelah itu atas perintah pemerintah pusat di Jakarta Komite Nasional Indonesia di Surabaya membentuk Badan Keamanan Rakyat, setelah pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 terjadi perubahan dari Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentera Keaman Rakyat (Basundoro, 2012 : 45).

2. Kondisi Ekonomi Kota Surabaya Pada Tahun 1945-1949.

Setelah proklamasi kemerdekaan lalu lintas perdagangan

di Jawa Timur khususnya kota Surabaya mulai berkembang dengan pesat karena berbagai rintangan yang dilakukan oleh tentara Jepang telah dihapus, meskipun pada saat itu ada beberapa peraturan pembatasan pengangkutan barang-barang dari suatu daerah ke daerah lain tetapi masih ada yang dipertahankan terutama “beras, jual beli hasil pertanian berdampak besar pada sektor perekonomian dan lalu lintas perekonomian khususnya perdagangan di Jawa Timur dan kota Surabaya diperlancar dengan adanya alat transportasi yang diselenggarakan oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKA) dan kemudian juga Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI)” (Sukadi, 1991: 213)

Pada saat awal kemerdekaan mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih sangat sulit dan kacau membuat perekonomian di kota Surabaya juga terdampak dan agak terganggu karena adanya *Hiperinflasi* atau *Inflansi* yang tidak terkedali menimpa negara Republik Indonesia, sumber *inflasi* ini terjadi karena peredaran mata uang Jepang tidak terkendali dan beredar ditengah masyarakat Indonesia berjumlah empat milyar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Surabaya pada tahun 1945-1949, yaitu mengalami kekacauan ekonomi yaitu masyarakat terpaksa menggunakan dua mata uang asing yaitu mata uang Hindia-Belanda dan uang Jepang yang menyebabkan *Inflansi* makin tinggi dan tidak terkendali, sehingga pemerintah mengeluarkan mata uang Indonesia atau yang disebut dengan *Oeng Repoeblik Indonesia* yang di

anggap dapat mengatasi inflansi tapi sebaliknya setelah pengeluaran mata uang *Oeng Repoeblik Indonesia* (ORI) perekonomian di kota Surabaya malah semakin tersendat dan hampir kacau karena *Oeng Repoeblik Indonesia* yang belum tersebar secara merata, serta adanya *blok kade* yang dilakukan Belanda pada pelabuhan-pelabuhan di di Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur menyebabkan sebagian barang tidak dapat keluar dari daerah Jawa, dan semakin memperburuk ekonomi masyarakat serta pemerintahan Belanda yang masih terus ikut campur mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia yang berdampak di kota Surabaya dan kota-kota lainnya yang menyebabkan kekacauan ekonomi.

3. Kondisi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Surabaya Pada Tahun 1945-1949.

Penduduk kota Surabaya yang merupakan masyarakat majemuk masyarakat Surabaya yang saat itu terdiri dari berbagai suku bangsa seluruh Indonesia diantaranya masyarakat asli dari berbagai suku di Indonesia dan warga Tionghoa mereka menyebut dirinya sebagai *Arek Surabaya* (putra Surabaya) dimana masyarakat ini tinggal di kampung-kampung, penduduk Surabaya sendiri memiliki pekerjaan terdiri dari berbagai kelompok sosial, yaitu :Kelompok buruh, kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok pelaut, kelompok tukang, dan kelompok elite pribumi. "Hubungan antar kelompok sosial tidak semata-mata atas kepentingan ekonomi, melainkan juga kepentingan ideologi, kultural, religious dan etnis, arek Surabaya atau masyarakat Surabaya sendiri mempunyai sifat terbuka, lekas akrab, berkawan,

kerakyatan dan suka humor" (Moehkardi, 2020: 22).

Peranan Mayor Jenderal Tni (PURN) Raden Mohamad Mangoendiprodjo Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya Tahun 1945-1949.

1. Peranan Mayor Jenderal TNI (Purn) Raden Mohamad Mangoendiprodjo dalam Membentuk BKR dan TKR Surabaya

Aktivitas Raden Mohamad atau yang disapa R Mohamad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya pada tahun 1945-1949 dimulai ketika pada tanggal 2 September 1945 malam, R Mohamad menghadiri rapat di Kaliasin yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia, Moehkardi dalam bukunya berjudul *R Mohamad Dalam Revolusi Surabaya 1945*, menyatakan bahwa: Pada tanggal 23 Agustus 1945 R Mohamad mendapat panggilan dari Doel Armowo yang saat itu menjabat sebagai ketua Komite Nasional Indonesia Surabaya Doel Armowo mengajak R Mohamad untuk turut menyusun Badan Keamanan Rakyat Surabaya atas usulan dari pemerintah agar membentuk Badan Keamanan Rakyat yang murni bentukan Indonesia, hadir dalam pertemuan itu adalah R Mohamad sebagai salah satu perwakilan dari ex Peta yang hadir pada saat itu yakni Soetopo, Katmadhi, drg Moestopo, Jonosewejo, Soerjo, Abdul Wahab, Koenkijat. Dalam pertemuan ini diputuskan untuk membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai ketua BPKKP yaitu Doel Arwono dan R Mohamad sebagai

wakil, aktivitas BPKPP Mohamad tidak berlangsung lama karena terdesak oleh BKR lalu R Mohamad masuk dan bergabung sebagai BKR Jawa Timur, dengan adanya dekret pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945, para anggota Badan Keamanan Rakyat dianjurkan untuk masuk ke dalam Tentara Keamanan Rakyat Surabaya dan semua anggota Badan Keamanan Rakyat otomatis menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat, lalu sebagai ketuanya adalah Moestopo, setelah pembentukan itu Menteri Pertahanan waktu itu yaitu drg. Moestopo menyusun stafnya sebagai berikut: Kepala Staf yaitu Soejatno, Urusan Angkatan Darat yaitu Mohamad, Urusan Angkatan Laut yaitu Atmadji, Perang Geriliya Kathmadi, Keuangan yaitu Soerojo (Moehkardi, 1993: 72-74).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintahan untuk menyempurnakan kebijakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya Pertempuran dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan untuk “mempersatukan dua kesatuan bersenjata yaitu Tentara Republik Indonesia sebagai badan reguler dan badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Tni.mil.id diakses pada 3 September 2021 Pukul 19.00 Wib).

R Mohamad sendiri resmi mendapatkan pangkat Mayor Jenderal pada 20 Mei 1946 dan diresmikan oleh presiden Republik Indonesia Ir Soekarno dan setelahnya terjadi perubahan nama pada badan keamanan rakyat Indonesia

menguubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia mewujudkan dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Revolusi dan Tentara Nasional, sebagai kekuatan yang baru lahir dan harus siap menerima rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer, rongrongan politik berasal dari komunis yang ingin menetapkan TNI di bawah pengaruh mereka di dalam negeri TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pergolakan PKI dan dari luar negeri “Tentara Nasional Indonesia harus menghadapi Agresi Militer Belanda, karena keterbatasan Tentara Nasional Indonesia maka rakyat Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta. Dan untuk itu integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat” (Nasution, 200: 176)

2. Peranan Mayor Jenderal Tni (PURN) Raden Mohamad Mangoendiprodjo Berperan dalam Mengambil Bagian Sejata Jepang dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Surabaya

Pada tanggal 30 September 1945 terjadi pengepungan terhadap Gudang senjata Don Boscho yang berisi senjata milik Jepang pada saat itu R Mohamad hadir di tengah masa pemuda di Don Boscho bukan disengaja karena ia pada saat itu sedang melakukan peninjauan keliling kota dari kantor Badan Keamanan Rakyat. Pada tengah malam 30 September 1945 terjadi perundingan antara para pemuda, Wartawan Antara dan beberapa orang pemimpin Pemuda Republik Indonesia, Sutomo atau yang dikenal dengan bung Tomo

menyadari gawatnya situasi saat itu jika terjadi ketidak samaan pendapat maka akan terjadi korban yang banyak saat itu terjadi perundingan yang dilakukan 2 pemimpin antara Bung Tomo dan R Mohamad itu untuk meredakan emosi para pemuda, bung Tomo dan beberapa pimpinan menemui pimpinan tentara Jepang perundingan berjalan alot, Mayor Hazimoto semula keberatan karena belum adanya perintah panglima, tetapi "akhirnya senjata itu di berikan dengan syarat keesokan paginya akan diberikan setelah perundingan bung Tomo dan R Mohamad memberi tahu hasil dari perundingan itu. Senjata itu dibagikan terutama senjata ring satunya kepada para tentara Badan Keamanan Rakyat Surabaya dapat memberi suplai senjata ke Jakarta" (Moehkardi,1993: 70).

Menurut Lorenzo Yauwerissa dalam bukunya *Pasukan Polisi Istimewa Prajurit Istimewa Dalam Perjuangan Kemerdekaan Di Jawa Timur* di jelaskan sebagai berikut mengenai isi perjanjian antara pihak Indonesia dan Jepang dalam perebutan senjata di Gudang Don Bosco: Perundingan yang dilakukan oleh Soejinto merupakan perwakilan dari barisan Pencegah Bahaya Udara (*Keibodan*) kota dan R Mohamad yang saat itu sebagai mantan *Daidanco* Peta melakukan perundingan dan berikut merupakan hasil dari perundingan: 1. komandan gudang senjata Don Bosco beserta wakil dari kompetai harus berjanji akan menyerahkan senjata-senjatanya setelah panglima tentara Jepang di Ja wa Timur Mayjen Iwabe mengetahui semua peristiwa yang terjadi, 2. Rakyat melakukan pengepungan Gudang senjata Don Bosco diminta untuk mengundurkan diri (Yauwerissa, 2013: 29).

Puncaknya adalah ketika kompetai menyerah pada pemuda Indonesia di petang harinya. Pertempuran sengit selama 36 jam, sampai Markas Kompetai berhasil dikuasai para Pemuda. Serangan yang berhasil mengalahkan Kompetai berakibat pada penyerahan senjata oleh Angkatan Laut Jepang di markas Gubeng. Jumlah senjata yang diserahkan yaitu: senapan berbagai jenis mencapai 27.830 pucuk senjata, jenis revolver 3.360 buah dan amunisi dalam jumlah yang sangat banyak. Diperkirakan jumlah ini adalah separo dari "seluruh senjata yang dikuasai Indonesia berada di Surabaya. Separo dari jumlah ini ada ditangan pengikut Pemuda Republik Indonesia, lebih banyak dari yang ada pada Badan Keamanan Rakyat. Sebagai tanda kemenangan banyak gedung disekitar bekas Markas Kompetai ditemplei poster *Milik Republik Indonesia*" (William,1989: 275).

3. Peranan Mayor Jenderal TNI (PURN) Raden Mohamad Mangoendiprodjo Berperan Dalam Pengambilan Dana di Bank Escomto Dalam Revolusi Fisik 1945 Surabaya.

Ditengah kesibukan pemuda Surabaya membentuk bermacam barisan bersenjata ada pula sejumlah pemimpin di Surabaya yang menyadari bahwa untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia itu bukan hanya saja kekuatan senjata tetapi juga dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai perjuangan. Pada saat itu Indonesia hanya bermodal selembat Teks Proklamasi kemerdekaan dan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya.

Pada saat itu R Mohamad yang disertai jabatan dan tanggung jawab sebagai bendahara Badan Keamanan Rakyat harus berfikir keras berupaya mencari dana bagi BKR khususnya dan bagi perjuangan Republik pada umumnya, lalu terbukalah jalan untuk memperolehnya melalui Dr.Samsi, seorang tokoh ekonomi dan pergerakan yang terkenal di Surabaya, sebagai Menteri keuangan dalam kabinet Republik Indonesia pertama Dr. Samsi berperan besar dalam membantu mencari dana guna membantu membiayai perjuangan pemerintahan Republik Indonesia. Dr Samsi memperoleh informasi bahwa di "Gendung Bank Escompto Surabaya tersimpan uang peninggalan dari Hindia Belanda yang disita oleh Jepang, karena hubungannya dengan para pemimpin Jepang dia berhasil membujuk Jepang. Suatu rekayasa kemudian disepakati Badan Keamanan Rakyat mengambil dana tersebut dengan cara *kekerasan* R Mohamad yang menjadi bendahara Badan Keamanan Rakyat, ditugaskan oleh Moestopo untuk mengrebek Bank tersebut" (Hidayat, 1980: 65)

Disinilah peranan R Mohamad dimulai Operasi pengedoran berjalan dengan lancar berpeti-peti uang gulden dalam waktu singkat berhasil dipindahkan dari Bank itu ke markas Badan Keamanan Rakyat. Menjelang pendaratan Inggris di Surabaya uang-uang itu dititipkan oleh Mohamad kepada kenalannya yaitu Pak Haji, sopir R Mohamad pun tidak mengetahui bahwa peti-peti yang meraka bawa adalah uang. Operasi pengedoran tersebut semula "dirahaskan hanya diketahui oleh Dr. Samsi, Moestopo, R Mohamad dan Syamsul Arifin wartawan Antara Surabaya. Setelah beberapa hari R Mohamad dan Moestopo baru

mengungkapkan bahwa uang yang berhasil diambil dalam pengedoran itu berjumlah 100.000.000,- (Seratus Juta Gulden dari jumlah uang tersebut sebanyak 35.000.000,- (Tiga puluh lima Gulden) disumbangkan kepada pemerintahan pusat Republik Indonesia' (Moehkardi, 1993: 50)

Kedudukan R Mohamad sebagai bendaharawan Badan Keamanan Rakyat yang dipercayai memegang kekuasaan dana besar itu mempunyai dampak tidak kecil dalam perjalanan hidupnya, karena hal itu R Mohamad mendapat "nilai positif dikalangan organisasi bersenjata di Surabaya sebab melalui R Mohamad tiap pasukan di Surabaya dapat memperoleh bantuan keuangan dan adanya dapur umum yang tersebar di masa darurat dan memperoleh dana dari uang rampasan tadi" (Notosusanto, 1982: 91)

4. Peranan R Mohamad dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dan Upaya R Mohamad Mempertahankan Kemerdekaan Tahun 1945-1949.

Pertempuran Surabaya merupakan suatu rangkaian peristiwa yang dimulai pada hari kedua sejak kedatangan Brigade 49/Devisi India ke 23 tentara Sekutu (AFNEI) di bawah Komando Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby mendarat untuk pertamakali di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya menjadi peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda, peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah "perang pertama pasukan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional

Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme” (Ricklefs, 2016: 325).

Dua hari setelah mendarat di Surabaya Inggris melakukan tindakan provokatif dengan menyebarkan pamflet di atas kota Surabaya, pamflet tersebut berisi menuntut dan mengancam rakyat Surabaya dan Jawa Timur agar menyerahkan kembali kepada Inggris senjata dan peralatan yang tentara Indonesia peroleh dari tangan Jepang, akibat tindakan provokatif dan khususnya “isi pamphlet Inggris tersebut timbullah reaksi keras dari rakyat Indonesia, kepercayaan para pemimpin Surabaya terhadap Tentara Sekutu Inggris yang semula sudah mulai tumbuh sekarang mulai hilang, sikap rakyat terutama kalangan pemuda timbul ketidakpercayaan dan timbul kemarahan besar dari kalangan masyarakat Surabaya “(Notosusanto, 1982: 30-32).

Malam hari menjelang badai di Surabaya R Mohamad selaku pimpinan Badan Keamanan Rakyat diam-diam melakukan pengintaian di sekitar markas dan tanksi tentara Inggris, R Mohamad berfirasat kuat bahwa pertempuran pasti akan pecah. Ulah Inggris yang provokatif itu menyebabkan hasrat pemuda-pemuda untuk menyerang dan mengusir Inggris sulit dicegah lagi. Pada saat itu R Mohamad berkeliling disekitaran Pos Inggris di Gudung HBS Surabaya di Jalan Wijayakusuma suasana panas di Surabaya mencapai klimaksnya. Pada tanggal 29 Oktober 1945 para pemimpin Badan Keamanan Rakyat Surabaya menyelenggarakan suatu pertemuan antara sejumlah pemimpin Badan Keamanan Rakyat dan Badan Perjuangan bersenjata. Dari Badan

Keamanan Rakyat sendiri diwakili oleh R Mohamad, Sutopo dan Katamhadi dan dari Badan Perjuangan Bersenjata diwakili oleh Soemarsono dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Bung Tomo dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) dalam pertemuan itu mereka sepakat tidak akan mentolelir tindakan provokatif Inggris dan mereka sepakat untuk melancarkan serangan kepada Tentara Inggris isi kesepakatan itu “*Om 5 uur Begint de Idonesische opstand* (pada jam 05.00 mulailah perlawanan bangsa Indonesia) itulah bunyi tekad para pemuda” (Armowo, 1974: 10).

Masa tanggal 1 November 1945 hingga 9 November 1945 masyarakat Surabaya diliputi oleh suasana ketidakpastian. Ancaman Cristison menimbulkan berbagai tafsiran, satu pihak menafsirkan sebagai gertakan saja dan ada pula yang menafsirkan serius, R Mohamad termasuk yang menganggapnya serius, hal ini dikaitkan dengan pernyataan Kapten Shaw pada R Mohamad di Gedung Internio yang intinya Inggris akan menuntut balas dendam atas kematian Mallaby dan Pada tanggal 10 November 1945 setelah adanya ultimatum dan tuntutan dari Mansergh agar “rakyat Surabaya menyerahkan senjata dengan mengangkat tangan ke atas dan tanda menyerah, memancing amarah pemuda Surabaya dan menjadi pertempuran paling sengit yang pernah terjadi di Indonesia di mulai” (Cindy, 1966: 345).

Pertempuran itu melibatkan berbagai Badan Perjuangan, seperti PRI, BPRI, Hisbullah, TKR dan kesatuan lainnya, mereka bergerak secara sendiri-sendiri dan tanpa kordinasi, serta kesatuan komando

para pemuda dan masyarakat hanya mempunyai tekad mengusir penjajah dari bumi Indonesia, pasukan Inggris melakukan seragan pada 10 November 1945 pukul 07.00 pagi, dengan melucuti senjata “pasukan Tentara Keamanan Rakyat di Kali Mas, dan melakukan penyergapan di pos-pos pertahanan Tentara Keamanan Rakyat, kesatuan Pemuda Republik Indonesia Angkatan Laut Tanjung Perak. Pemuda Republik Indonesia Angkatan Laut yang berangotakan 30 orang Inggris melakukan serangan pukul 10.00 dengan serangan dari udara tembakan Meriam terhadap sejumlah Gedung yang diperkirakan menjadi markas pertahanan Surabaya, serangan tiap hari terus dilakukan pasukan Inggris sehingga korban jiwa terus berjatuh” (Nutosusanto, 1982: 99).

Ditengah situasi pertempuran yang panas Soemarsono yang menjabat ketua PRRI Surabaya melakukan pertemuan antara pimpinan Badan Perjuangan Bersenjata dengan TKR di Sepanjang, pada tanggal 15 November dilakukan pertemuan dengan jumlah anggota yang lebih besar, rapat ini dikhususkan untuk membahas mengenai kordinasi antar instansi pemerintah daerah, Soengkono menekankan pembentukan 4 sektor pertempuran yang telah di taati, mereka sepakat untuk membentuk badan perjuangan bernama Dewan Pertahanan Rakyat Indonesia di Surabaya yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam memutuskan pertahanan, dalam pertemuan ini R Mohamad terpilih menjadi kepala Markas Pertahanan kota Surabaya, Markas Pertahanan Kota Surabaya membawahi 4 Sektor yaitu sektor barat, sektor tengah bagian barat, sektor tengah bagian timur, alasan

Soemarsono “memilih R Mohamad sebagai ketua PDRI karena latar belakang R Mohamad dan aktifitas R Mohamad Sejak awal revolusi dan integritas R Mohamad sebagai seorang nasionalis, dan R Mohamad memiliki pengalaman sebagai komandan militer ex daidanco dan sebagai pejabat senior pembentuk BKR” (Moehkardi, 1993: 108).

Setiap hari R Mohamad yang bermarkas di Wonocolo, melihat ratusan orang mengungsi dan keluar dari kota melihat hal ini R Mohamad tidak bisa membiarkan situasi ini terus terjadi karena akan semakin banyak korban jiwa berjatuh, untuk mengatasi hal itu R Mohamad membuat ketentuan “bila ada sekelompok pemuda meninggalkan kota, mereka wajib melapor dan menyerahkan senjata mereka ke pihak PDRI, bila keberatan mereka diwajibkan kembali ke kota Surabaya, setelah ketentuan dijalankan ada 50 pemuda yang ditangkap karena mereka tidak mau menyerahkan senjata kepada pihak Dewan Pertahanan Rakyat Indonesia” (Notosusanto, 1982: 44).

Pertempuran ganas itu terus berlangsung selama lebih tiga minggu pertempuran yang banyak dihiasi dengan tindak kepahlawanan itu menelan korban jiwa besar di ke dua belah pihak terutama pihak Indonesia, Inggris mengerahkan semua kemampuannya untuk mengempur dari darat, laut dan udara dengan menjatuhkan bom di perumahan penduduk. Ribuan penduduk Surabaya yang panik akibat baku tembak antara pejuang Indonesia dan Inggris masyarakat mengungsi kearah selatan ribuan pengungsi yang “disangka *esktrimis* di bantai habis-habisan oleh tentara Inggris dan seluruh kota di kuasi oleh Inggris

operasi pertempuran terhenti di garis pertahanan dari Mojekerto di Barat” (Andreson,1988: 193).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai *Peranan Mayor Jenderal TNI (PURN) Raden Mohamad Mangoendiprodjo dalam Mempertahakan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya pada tahun 1945-1949*, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Mayor Jenderal TNI (PURN) Raden Mohamad Mangoendiprodjo dalam Mempertahakan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya pada tahun 1945- 1949, Raden Mohamad Mangoendiprodjo adalah merupakan tentara ex peta yang kemudian bergabung menjadi Badan Keamanan Rakyat, yang karena kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia R Mohamad ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan di kota Surabaya pada pertempuran panas 10 November 1945.
2. Kondisi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan Agama masyarakat Surabaya pada tahun 1945-1949, kondisi politik di kota Surabaya pada saat itu berjalan sangat panas dengan adanya pembentukan pemerintahan daerah Surabaya dan ancaman dari Belanda yang akan kembali menguasai Indonesia. Kondisi ekonomi Surabaya pada masa itu terjadi *hiferinflasi* akibat penyebaran mata uang yang belum stabil antara uang Jepang dan uang Oeang

Republik Indonesia, menyebabkan ekonomi Surabaya tidak stabil. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Surabaya yang sangat majemuk dengan berbagai suku bangsa yang hidup secara berdampingan serta budaya Surabaya yang terkenal dengan kesenian Ludruk, drama dan pewayangan.

3. Peranan Mayor Jenderal TNI (Purn) Raden Mohamad Mangoendiprodjo Dalam Mempertahakan Kemerdekaan Indonesia Di Surabaya Pada Tahun 1945-1949. R Mohamad ikut serta dan berperan dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat di Surabaya, R Mohamad ikut dalam pengambilan bagian senjata Jepang di gudang senjata Don Bosco pada dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 di Surabaya, R Mohamad ikut berperan dalam operasi pengambil dana di Bank Escompto di Surabaya, R Mohamad ikut berjuang di garis depan dalam pertempuran 10 November di Surabaya 1945, Sebagai ketua Dewan Pertahanan Rakyat Indonesia DPRI Jawa Timur dan komandan TKR Jawa Timur yang membantu tentara Indonesia melawan Inggris pada pertempuran 10 November 1945, R Mohamad Mendapat tugas dari Presiden Ir.Soekarno untuk menyelidiki senjata selundupan dari Singapura yang di salahgunakan oleh Arif Syariffudin dan dibagikan kepada pendukungnya sendiri.

4. Dampak dari perjuangan Mayor Jenderal Tni (Purn) Raden Mohamad Mangoendiprojo Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya Tahun 1945-1949 adalah berhasil membentuk Badan Keamanan Rakyat divisi Jawa Timur yang berguna untuk memperkuat keamanan masyarakat Surabaya pada saat itu, dampak dari perjuangan R Mohamad mengambil senjata Jepang adalah dapat membantu memperkuat persenjataan BKR Jawa Timur dan Barisan pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan, dampak dari perjuangan R Mohamad dalam pengambilan Dana di Bank Escompto adalah dapat membantu dana perang bagi BKR dan BKR Pusat dalam menghadapi NICA dan AFNEI, dan perjuangan R Mohamad dalam membuat kebijakan pada saat pertempuran 10 November dengan hasil dapat menekan korban jiwa yang berjatuh. Secara Global dampaknya adalah Belanda akhirnya meninggalkan Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945, setelah sebelumnya diawali dengan berbagai macam aksi perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu diadakannya perjanjian Linggarjati yang terjadi pada 25 Maret 1947 antara Indonesia Belanda, pada tanggal 28 Desember 1947 dilanjutkan dengan perundingan Renville atas pengawasan Komisi Tiga Negara dalam upaya memdamai Indonesia-

Belanda, lalu pada 19 Desember 1948 Belanda kembali menyerang Indonesia dengan mengadakan Agresi Militer II di Yogyakarta dalam hal ini upaya masyarakat Indonesia melakukan perlawanan dengan perang Gerilya, setelah itu dilanjutkan dengan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus-2 November yang dilakukan Indonesia Belanda setelah pasukan NICA berhasil dikalahkan di Yogyakarta, konferensi ini menjadi penanda berakhirnya kekalahan Belanda dan Belanda resmi mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Daftar Pustaka

- Andreson, Ben. (1988). *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Andang, F. (2013). *Agresi Militer Belanda II*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Armowo, Doel. (1974). *Pengaruh Pristiwa 10 November Terhadap Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Surabaya*. Bandung: Sinar Harapan.
- Gottschalk, Louis. (2008). *Mengerti Sejarah. (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI Press
- Hayashi, Eiinchi. (2011). *Mereka Yang Terlupakan Rahmat Shigiro Ono Bekas Tentara Jepang Yang Memihak Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Kompas, Pedia. *Tentara PETA: Sejarah Pembentukan dan Pemberontakan di Blitar 1945*.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/tentara-peta-sejarah-pembentukan-dan-pemberontakan-di-blitar-1945>.
Diakses pada 27 Agustus 2021

Maeswara, Garda. (2012). *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1949 Perjuangan Diplomasi Untuk Mempertahakan Kemerdekaan*. Yogyakarta: Narasi 2010

Rehardini, *Peranan Mayor Jenderal...*

Moehkardi. (1993). *Sebuah Biografi R Muhamad Dalam Revolusi 1945 Surabaya*. Jakarta: Lima Sekawan

Moehkardi. (2020). *Peran Surabaya Dalam Revolusi Nasional 1945*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press